



Analisis Komparatif Kebijakan Pendidikan di Indonesia dan Finlandia

Salman Al Farisy^{1*}, Nathasya Fitria², Garin Wulan Raja³, Nurul Kamaly⁴, Afrijal⁵,
Ibnu Phonna Nurdin⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

*Corresponding Author: salmanalfarisy1924@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 05-05-2026

Diterima: 01-06-2026

Diterbitkan: 31-07-2026

Keywords:

Education Policy;
Curriculum; Education
Governance; Teacher
Autonomy; Education
Reform

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan;
Kurikulum; Tata Kelola
Pendidikan; Otonomi
Guru; Reformasi
Pendidikan

Abstract

This study aims to analyze the comparative education policies of Indonesia and Finland, focusing on curriculum, teacher autonomy, educational equity, and evaluation systems, and their implications for national education reform. This research uses a qualitative approach with a comparative study method through a review of academic literature. The results indicate that fundamental differences between the two countries lie not only in policy design but also in the paradigm of educational governance. Indonesia tends to adopt a control-based governance approach characterized by reactive curriculum changes, a predominance of standards-based evaluations, and a high administrative burden on teachers. In contrast, Finland implements trust-based governance, emphasizing policy stability, teacher professional autonomy, equity-based equity, and formative evaluation oriented toward student development. These findings reveal a mismatch between Indonesia's educational goals, which focus on developing competencies and character, and policy instruments that are still based on control and standardization. As a contribution, this study offers a hybrid governance model framework that integrates policy accountability with strengthening trust in teacher professionalism. Policy implications include long-term curriculum simplification, reducing teacher administrative burdens, strengthening area-based interventions for educational equity, and transforming the evaluation system toward diagnostic and formative assessments.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan pendidikan di Indonesia dan Finlandia dengan fokus pada kurikulum, otonomi guru, pemerataan pendidikan, dan sistem evaluasi, serta implikasinya bagi reformasi pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif melalui kajian literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara kedua negara tidak hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi pada paradigma tata kelola pendidikan. Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan control-based



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

governance yang ditandai dengan perubahan kurikulum yang reaktif, dominasi evaluasi berbasis standar, serta tingginya beban administratif guru. Sebaliknya, Finlandia menerapkan trust-based governance yang menekankan stabilitas kebijakan, otonomi profesional guru, pemerataan berbasis keadilan, serta evaluasi formatif yang berorientasi pada perkembangan siswa. Temuan ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan Indonesia yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan karakter dengan instrumen kebijakan yang masih berbasis kontrol dan standarisasi. Sebagai kontribusi, penelitian ini menawarkan kerangka hybrid governance model yang mengintegrasikan akuntabilitas kebijakan dengan penguatan kepercayaan terhadap profesionalisme guru. Implikasi kebijakan mencakup penyederhanaan kurikulum jangka panjang, pengurangan beban administratif guru, penguatan intervensi berbasis wilayah untuk pemerataan pendidikan, serta transformasi sistem evaluasi menuju asesmen diagnostik dan formatif.

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Sistem pendidikan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen dalam membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dalam konteks global, kualitas pendidikan sering dijadikan indikator keberhasilan suatu negara dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, sehingga mendorong perlunya evaluasi dan pengembangan sistem pendidikan secara berkelanjutan (Ananda et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, banyak negara berkembang masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan yang ideal dengan implementasi kebijakan di lapangan, khususnya dalam hal tata kelola, distribusi sumber daya, dan sistem evaluasi pembelajaran.

Salah satu negara yang sering dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem pendidikan adalah Finlandia. Negara ini dikenal berhasil membangun sistem pendidikan yang unggul melalui prinsip kesetaraan, fleksibilitas kurikulum, serta kualitas tenaga pendidik yang tinggi. Finlandia juga menekankan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, minim tekanan kompetisi, dan berbasis kepercayaan terhadap profesionalisme guru. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan jangka panjang dan model tata kelola pendidikan yang berbasis kepercayaan (*trust-based governance*), yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata (Sahlberg, 2015; OECD, 2020).

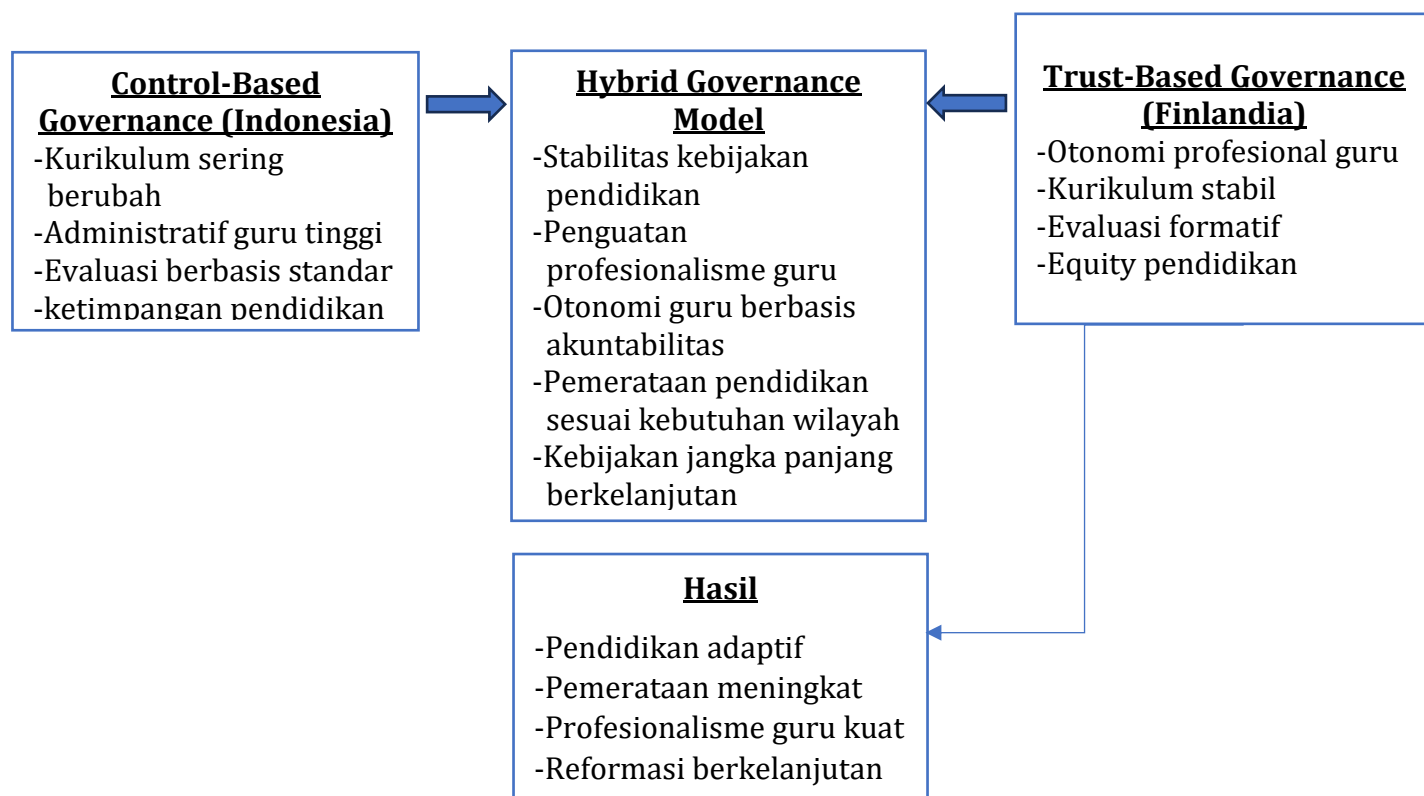
Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan seperti perubahan kurikulum yang relatif cepat, ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, serta sistem pembelajaran yang

masih berorientasi pada hasil menjadi isu yang terus muncul dalam praktik pendidikan nasional. Selain itu, capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata negara OECD menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata (OECD, 2019; Annur et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan desain kebijakan dan tata kelola pendidikan.

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan melalui kebijakan desentralisasi pendidikan, peningkatan anggaran, serta inovasi kurikulum, tantangan implementasi masih menjadi hambatan utama. Banyak kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung bersifat administratif dan berbasis kontrol, sehingga membatasi ruang inovasi dan otonomi guru dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh aspek fundamental dalam sistem pendidikan, khususnya terkait paradigma tata kelola kebijakan (Adha et al., 2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya hanya membandingkan sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia pada aspek deskriptif, seperti kurikulum, metode pembelajaran, atau capaian siswa, tanpa mengkaji secara mendalam perbedaan paradigma tata kelola kebijakan yang mendasarinya. Padahal, keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikelola dan diimplementasikan. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami hubungan antara model tata kelola pendidikan dengan efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menempatkan perbandingan sistem pendidikan dalam kerangka *hybrid governance model*, khususnya melalui analisis perbedaan antara pendekatan *control-based governance* dan *trust-based governance*. Pendekatan ini menjadi penting karena memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam memahami akar permasalahan pendidikan di Indonesia, sekaligus menawarkan arah reformasi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat komparatif-deskriptif, tetapi juga berkontribusi secara konseptual dalam pengembangan model kebijakan pendidikan yang lebih adaptif.



Gambar 1. Model Hybrid Governance Berbasis Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia dengan menitikberatkan pada aspek kebijakan kurikulum, otonomi guru, pemerataan pendidikan, sistem evaluasi, serta implikasinya terhadap reformasi kebijakan pendidikan nasional. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif sekaligus menjadi bahan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif berbasis studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia dari berbagai aspek, seperti kebijakan kurikulum, peran guru, pemerataan pendidikan, serta sistem evaluasi pembelajaran. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan (Creswell & Creswell, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 25 referensi utama yang terdiri dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan dari lembaga internasional seperti OECD, UNESCO, dan World Bank. Pemilihan sumber dilakukan

secara purposive berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penulis, serta keterkaitan dengan fokus penelitian (Snyder, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem pendidikan kedua negara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-komparatif, yaitu membandingkan karakteristik sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta keunggulan masing-masing sistem pendidikan. Metode ini dinilai efektif dalam menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pendidikan antarnegara (George & Bennett, 2005).

Selain itu, proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan proses analisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan hasil perbandingan sebagai dasar dalam merumuskan implikasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan analisis data kualitatif yang menekankan proses interpretatif dan sistematis terhadap data sekunder (Miles et al., 2014).

Dengan demikian, metode studi literatur dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber data, tetapi juga sebagai landasan analisis dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan secara komprehensif serta merumuskan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Kebijakan Kurikulum di Indonesia dan Stabilitas Kurikulum Finlandia

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu persoalan mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia terletak pada dinamika kebijakan kurikulum yang cenderung mengalami perubahan secara berkala mengikuti arah kebijakan pemerintah. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Namun, perubahan yang terlalu sering tersebut justru menimbulkan tantangan dalam proses implementasi di lapangan, terutama berkaitan dengan kesiapan guru, penyediaan perangkat pembelajaran, serta penyesuaian sistem evaluasi yang harus terus diperbarui. Kondisi ini menyebabkan sekolah dan tenaga pendidik lebih banyak mengalokasikan waktu dan energi untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dibandingkan dengan mengembangkan kualitas pembelajaran itu sendiri (Annur et al., 2024).

Selain itu, perubahan kurikulum yang cepat juga berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam proses pendidikan, baik bagi guru maupun peserta didik. Guru sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk segera memahami dan menerapkan kebijakan baru tanpa dukungan pelatihan yang memadai. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan, sehingga tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam konsistensi kebijakan (*policy inconsistency*) yang dapat memengaruhi efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan.

Sebaliknya, Finlandia menunjukkan pola kebijakan kurikulum yang relatif stabil dan berorientasi jangka panjang. Kurikulum di Finlandia tidak mudah berubah karena dirancang sebagai bagian dari strategi nasional yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan politik. Stabilitas ini memberikan kepastian bagi sekolah dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga mereka dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Muryanti & Herman, 2021).

Selain stabil, kurikulum di Finlandia juga bersifat fleksibel dan adaptif terhadap konteks lokal. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sosialnya, tanpa harus terikat secara kaku pada standar nasional. Fleksibilitas ini mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih kontekstual, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan nyata siswa (Aprila, 2025). Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh isi kurikulum, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan dan fleksibilitas dalam implementasinya.

Dalam konteks global, stabilitas kurikulum menjadi salah satu indikator penting dalam efektivitas sistem pendidikan. Studi terbaru menunjukkan bahwa negara dengan perubahan kurikulum yang minimal cenderung memiliki hasil pembelajaran yang lebih konsisten karena sekolah dan guru memiliki waktu yang cukup untuk menginternalisasi kebijakan serta mengembangkan praktik pedagogik yang efektif (OECD, 2021). Sebaliknya, perubahan kebijakan yang terlalu cepat justru dapat menimbulkan *policy fatigue* di kalangan guru, sehingga menghambat proses inovasi pembelajaran dan menurunkan kualitas implementasi kebijakan di tingkat sekolah.

Dalam perspektif *education governance*, dinamika kurikulum di Indonesia mencerminkan pendekatan *policy-driven reform* yang berorientasi pada perubahan struktural jangka pendek, sementara Finlandia menunjukkan pendekatan *systemic coherence* yang menekankan kesinambungan kebijakan dalam jangka panjang (Fullan & Quinn, 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kurikulum tidak hanya

ditentukan oleh substansi isi, tetapi juga oleh stabilitas ekosistem kebijakan yang mendukung implementasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Finlandia tidak hanya terletak pada frekuensi perubahan kurikulum, tetapi juga pada orientasi kebijakan yang mendasarinya. Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan kurikulum yang dinamis namun reaktif terhadap perubahan kebijakan, sementara Finlandia mengedepankan stabilitas dan konsistensi jangka panjang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa stabilitas kebijakan memberikan ruang bagi guru untuk mengoptimalkan implementasi pembelajaran, sedangkan perubahan yang terlalu cepat berpotensi mengganggu kesinambungan proses pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Otonomi Guru dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Aspek kedua yang menjadi perhatian dalam perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia adalah posisi guru dalam implementasi kebijakan pendidikan. Di Indonesia, guru masih cenderung diposisikan sebagai pelaksana kebijakan yang bersifat top-down, yaitu menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat. Meskipun Kurikulum Merdeka telah memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar dalam pembelajaran, pada praktiknya guru masih dihadapkan pada berbagai tuntutan administratif yang cukup tinggi, seperti penyusunan modul ajar, asesmen diagnostik, pelaporan capaian pembelajaran, serta pengelolaan data digital pendidikan. Beban administratif ini seringkali menyita waktu dan energi guru, sehingga mengurangi fokus mereka dalam mengembangkan kreativitas pembelajaran di kelas (Annur et al., 2024).

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pelatihan profesional juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Tidak semua guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan kualitas guru antarwilayah yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Dalam konteks ini, profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh dukungan sistem yang diberikan oleh negara (Ananda et al., 2023).

Berbeda dengan Indonesia, Finlandia menempatkan guru sebagai profesi strategis dalam sistem pendidikan nasional. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai perancang pembelajaran, pengambil keputusan pedagogik, serta evaluator perkembangan siswa. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari pemerintah terhadap guru menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pendidikan Finlandia, karena guru dianggap sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan belajar siswa secara langsung (Muryanti & Herman, 2021).

Selain itu, profesi guru di Finlandia memiliki standar yang sangat tinggi dengan sistem seleksi yang ketat. Mayoritas guru di Finlandia memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister, sehingga memiliki kompetensi akademik dan pedagogik yang kuat. Dengan kualitas sumber daya yang tinggi, guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif tanpa tekanan administratif yang berlebihan. Hal ini memungkinkan terciptanya proses pembelajaran yang lebih kreatif, humanis, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa (Fitria, 2024).

Secara internasional, otonomi guru telah diakui sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang memberikan ruang otonomi lebih besar kepada guru cenderung menghasilkan pembelajaran yang lebih adaptif dan inovatif karena guru memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa (Darling-Hammond et al., 2020). Sebaliknya, sistem yang terlalu administratif dapat membatasi kreativitas guru dan mengurangi efektivitas proses pembelajaran.

Selain itu, laporan global terbaru menegaskan bahwa kualitas guru tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh desain kebijakan yang mendukung pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*) secara merata (Schleicher, 2023). Dalam konteks Indonesia, keterbatasan akses pelatihan dan distribusi guru yang tidak merata menunjukkan bahwa persoalan otonomi guru tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan sistemik dalam tata kelola pendidikan.

Perbandingan menunjukkan bahwa posisi guru dalam sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia berada dalam paradigma yang berbeda. Di Indonesia, guru masih cenderung diposisikan sebagai pelaksana kebijakan dengan beban administratif yang tinggi, sedangkan di Finlandia guru memiliki otonomi yang luas sebagai pengambil keputusan pedagogik. Perbedaan ini berdampak pada kualitas pembelajaran, di mana otonomi yang tinggi di Finlandia mendorong inovasi dan kreativitas, sementara keterbatasan otonomi di Indonesia berpotensi membatasi pengembangan metode pembelajaran yang adaptif.

Pemerataan Pendidikan sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Aspek ketiga yang menjadi perhatian dalam perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia adalah pemerataan pendidikan. Finlandia dikenal sebagai negara yang berhasil menerapkan prinsip kesetaraan (*equity*) dalam pendidikan, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah tempat tinggal. Pemerintah Finlandia memastikan bahwa fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta layanan pendukung tersedia secara merata di seluruh wilayah negara (Muryanti & Herman, 2021).

Selain itu, sistem pendidikan Finlandia juga didukung oleh kebijakan pendidikan gratis yang mencakup berbagai kebutuhan siswa, seperti biaya sekolah, buku pelajaran, hingga layanan makan siang di sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas individu, tetapi juga sebagai instrumen dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat.

Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil masih terlihat jelas, baik dari segi fasilitas, akses teknologi, maupun kualitas tenaga pengajar. Sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), sehingga menciptakan ketimpangan dalam kualitas pembelajaran (Annur et al., 2024).

Selain itu, distribusi guru yang tidak merata juga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga pendidik, sementara di wilayah perkotaan jumlah guru relatif lebih memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan distribusi sumber daya pendidikan masih belum sepenuhnya berbasis kebutuhan daerah. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.

Dalam literatur pendidikan global, konsep pemerataan (*equity*) tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas hasil pembelajaran yang relatif setara antar kelompok sosial. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pemerataan pendidikan yang tinggi cenderung memiliki kesenjangan capaian belajar yang lebih kecil antar siswa (UNESCO, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial memiliki dampak langsung terhadap kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pendidikan tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh distribusi anggaran, infrastruktur, dan teknologi pendidikan yang belum merata. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesenjangan digital (*digital divide*) menjadi faktor baru yang memperlebar ketimpangan pendidikan, terutama setelah pandemi COVID-19 (World Bank, 2021). Kondisi ini mempertegas bahwa pemerataan pendidikan harus dipahami sebagai isu multidimensional yang membutuhkan intervensi kebijakan yang terintegrasi.

Hasil komparatif menunjukkan bahwa pendekatan pemerataan pendidikan di Indonesia dan Finlandia memiliki perbedaan mendasar. Finlandia menempatkan prinsip kesetaraan sebagai fondasi utama dengan distribusi sumber daya yang merata, sementara

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan sistem pendidikan Finlandia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh komitmen negara dalam memastikan keadilan akses dan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Sistem Evaluasi: Standarisasi versus Humanisasi Pembelajaran

Perbedaan lain yang cukup signifikan antara sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia terletak pada sistem evaluasi pembelajaran. Di Indonesia, sistem evaluasi masih cenderung berorientasi pada standarisasi capaian akademik melalui berbagai bentuk penilaian yang terukur. Meskipun telah terjadi perubahan dari ujian nasional menuju asesmen nasional, budaya pendidikan yang menekankan nilai, peringkat, dan capaian hasil belajar masih cukup dominan dalam praktik pembelajaran (Annur et al., 2024).

Orientasi pada hasil ini berdampak pada pola pembelajaran di kelas, di mana guru sering kali lebih fokus pada pencapaian target materi dan hasil evaluasi dibandingkan dengan pengembangan pemahaman mendalam siswa. Akibatnya, proses pembelajaran cenderung bersifat mekanis dan kurang mendorong kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta pemecahan masalah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Sebaliknya, Finlandia menerapkan sistem evaluasi yang lebih humanis dan berorientasi pada perkembangan individu siswa. Penilaian tidak hanya dilakukan melalui ujian, tetapi juga melalui observasi dan evaluasi proses belajar yang dilakukan secara berkelanjutan oleh guru. Pendekatan ini memungkinkan guru memahami perkembangan siswa secara lebih komprehensif, baik dari aspek akademik maupun non-akademik (Muryanti & Herman, 2021).

Dengan sistem evaluasi yang lebih fleksibel, siswa di Finlandia tidak mengalami tekanan akademik yang berlebihan. Mereka diberikan ruang untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing, sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa.

Secara global, sistem evaluasi berbasis standar (*standardized testing*) mulai banyak dikritik karena dianggap tidak mampu mengukur kemampuan kompleks seperti berpikir kritis dan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada tes standar dapat mendorong praktik pembelajaran yang sempit (*teaching to the test*) dan mengurangi kualitas pengalaman belajar siswa (OECD, 2020). Oleh karena itu, banyak negara mulai beralih ke sistem evaluasi yang lebih holistik dan berbasis proses.

Finlandia menjadi salah satu contoh negara yang berhasil mengimplementasikan evaluasi formatif secara sistemik, di mana penilaian digunakan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran, bukan sekadar mengukur hasil. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa serta mengurangi tekanan akademik yang berlebihan (Halinen et al., 2021). Model ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang humanis dapat berjalan efektif ketika didukung oleh kepercayaan terhadap profesionalisme guru.

Perbandingan sistem evaluasi menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara Indonesia dan Finlandia. Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan evaluasi berbasis standar untuk mengukur capaian akademik, sedangkan Finlandia mengedepankan evaluasi formatif yang berorientasi pada proses pembelajaran. Perbedaan ini berdampak pada pengalaman belajar siswa, di mana sistem Finlandia lebih mendukung pengembangan potensi individu secara menyeluruh, sementara sistem di Indonesia masih berfokus pada pencapaian hasil yang terukur.

Tabel 1. Analisis Komparatif Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia

Aspek	Indonesia (Control-Based Governance)	Finlandia (Trust-Based Governance)	Implikasi Reformasi Pendidikan Indonesia
Kebijakan Kurikulum	Perubahan kurikulum relatif cepat dan cenderung mengikuti dinamika kebijakan pemerintah	Kurikulum stabil, fleksibel, dan berorientasi jangka panjang	Perlunya stabilitas kebijakan dan penyederhanaan kurikulum jangka panjang
Otonomi Guru	Guru berperan sebagai pelaksana kebijakan dengan beban administratif tinggi	Guru memiliki otonomi profesional tinggi dan dipercaya sebagai pengambil keputusan pedagogik	Penguatan profesionalisme guru dan pengurangan beban administratif
Pemerataan Pendidikan	Masih terdapat kesenjangan fasilitas, distribusi guru, dan akses pendidikan antarwilayah	Pemerataan pendidikan berbasis <i>equity</i> dengan distribusi sumber daya yang merata	Intervensi kebijakan berbasis kebutuhan wilayah untuk mengurangi ketimpangan pendidikan
Sistem Evaluasi	Evaluasi berorientasi pada standar, capaian akademik, dan hasil pembelajaran	Evaluasi formatif berfokus pada proses belajar dan perkembangan siswa	Transformasi evaluasi menuju asesmen diagnostik dan formatif
Paradigma Tata Kelola	Menekankan kontrol administratif, standarisasi, dan perubahan kebijakan reaktif	Menekankan kepercayaan terhadap profesionalisme guru dan keberlanjutan kebijakan	Penerapan <i>Hybrid Governance Model</i> yang mengintegrasikan akuntabilitas dan kepercayaan

Orientasi Reformasi	Reformasi cenderung bersifat reaktif terhadap perubahan kebijakan	Reformasi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan	Reformasi pendidikan diarahkan pada tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan
---------------------	---	--	--

Implikasi Reformasi Kebijakan Pendidikan Indonesia

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan Finlandia tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh tata kelola kebijakan yang konsisten, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Konsistensi kebijakan, kualitas guru, pemerataan pendidikan, serta sistem evaluasi yang humanis menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan (Hailitik, 2024).

Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pendidikan, seperti perubahan kebijakan yang cepat, kesenjangan fasilitas antarwilayah, beban administratif guru, serta sistem evaluasi yang masih berorientasi pada hasil. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa reformasi pendidikan di Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada perubahan kurikulum semata (Annur et al., 2024).

Selain itu, reformasi pendidikan di Indonesia perlu mengedepankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, sekolah, dan pemerintah daerah. Pendekatan ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Dengan demikian, pembelajaran dari sistem pendidikan Finlandia dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan Indonesia yang lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Reformasi yang dilakukan tidak hanya harus bersifat struktural, tetapi juga kultural, sehingga mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Reformasi pendidikan di Indonesia perlu diarahkan pada perubahan paradigma tata kelola dari pendekatan berbasis kontrol menuju pendekatan berbasis kepercayaan (*trust-based governance*). Studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang mengedepankan kepercayaan terhadap aktor pendidikan, khususnya guru, memiliki tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yang lebih tinggi (Sahlberg, 2021). Hal ini karena kebijakan yang fleksibel lebih mudah diadaptasi sesuai dengan konteks lokal.

Secara keseluruhan, perbandingan antara Indonesia dan Finlandia menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh paradigma tata kelola yang mendasarinya. Finlandia berhasil mengembangkan sistem berbasis kepercayaan dan keberlanjutan kebijakan, sedangkan

Indonesia masih berada dalam pendekatan yang cenderung berbasis kontrol dan perubahan kebijakan jangka pendek. Oleh karena itu, reformasi pendidikan di Indonesia perlu diarahkan pada transformasi paradigma kebijakan yang lebih stabil, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia tidak hanya terletak pada aspek teknis seperti kurikulum, peran guru, pemerataan pendidikan, dan sistem evaluasi, tetapi juga pada paradigma tata kelola pendidikan yang mendasarinya. Indonesia masih cenderung menerapkan pendekatan berbasis kontrol yang ditandai dengan perubahan kebijakan yang relatif cepat, beban administratif guru yang tinggi, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, serta sistem evaluasi yang berorientasi pada hasil. Sementara itu, Finlandia menunjukkan pendekatan berbasis kepercayaan dengan kebijakan yang stabil, otonomi guru yang tinggi, pemerataan pendidikan yang merata, serta sistem evaluasi yang berorientasi pada proses dan perkembangan siswa.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan Finlandia tidak semata-mata disebabkan oleh desain kebijakan yang lebih baik, tetapi juga oleh konsistensi dalam implementasi dan kepercayaan terhadap aktor pendidikan, khususnya guru. Sebaliknya, tantangan yang dihadapi Indonesia lebih bersifat struktural dan sistemik, terutama dalam menjaga kesinambungan kebijakan serta memastikan distribusi sumber daya pendidikan yang adil dan merata.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi pendidikan di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan kebijakan secara teknis, tetapi juga pada transformasi paradigma tata kelola pendidikan. Pendekatan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berbasis kepercayaan terhadap profesionalisme guru menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Selain itu, upaya reformasi juga perlu memperhatikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan serta pengembangan sistem evaluasi yang lebih mendukung proses pembelajaran secara menyeluruh.

Daftar Rujukan

- Adha, M. M., et al. (2019). Analisis kebijakan pendidikan di Indonesia dalam perspektif desentralisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 6(2), 123–135.
- Ananda, R., et al. (2023). Transformasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 12(1), 45–58.
- Annur, C. M., et al. (2024). Tantangan implementasi kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 13(2), 89–102.

- Aprila, D. (2025). Fleksibilitas kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Finlandia. *Jurnal Pendidikan Global*, 5(1), 33–47.
- Asmara, R., & Raflesia, D. (2023). *Pendidikan terbaik di dunia*. Penerbit Edukasi Nusantara.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Darling-Hammond, L. (2021). Defining teaching quality around the world. *European Journal of Teacher Education*, 44(3), 295–308. <https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1919080>
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Fitria, N. (2024). Profesionalisme guru dalam sistem pendidikan Finlandia. *Jurnal Pendidikan Internasional*, 8(1), 55–68.
- Fullan, M., & Quinn, J. (2020). *Coherence: The right drivers in action for schools, districts, and systems*. Corwin Press.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- Hailitik, R. (2024). Keunggulan sistem pendidikan Finlandia dalam perspektif global. *Jurnal Pendidikan Komparatif*, 7(1), 21–34.
- Halinen, I., Harmanen, M., & Mattila, P. (2021). Finland's curriculum reform and the development of transversal competencies. *European Journal of Education*, 56(3), 379–394. <https://doi.org/10.1111/ejed.12465>
- Hargreaves, A. (2021). What the COVID-19 pandemic has taught us about teachers and teaching. *Educational Research for Policy and Practice*, 20(3), 183–187.
- Hatip, A., & Setiawan, D. (2022). Analisis data kualitatif dalam penelitian pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 10(2), 67–78.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muryanti, & Herman. (2021). Perbandingan sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. *Jurnal Pendidikan Komparatif*, 4(2), 101–115.
- OECD. (2019). *PISA 2018 results (Volume I): What students know and can do*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- OECD. (2020). *Education at a glance 2020: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/69096873-en>
- OECD. (2021). *Education policy outlook 2021: Shaping responsive and resilient education in a changing world*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/75e40a16-en>

- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>
- Sahlberg, P. (2015). *Finnish lessons 2.0: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
- Sahlberg, P. (2020). Will the pandemic change schools? *Journal of Professional Capital and Community*, 5(3–4), 359–365. <https://doi.org/10.1108/JPC-05-2020-0026>
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
- Schleicher, A. (2020). *World class: How to build a 21st-century school system*. OECD Publishing.
- Schleicher, A. (2023). *World class: How to build a 21st-century school system*. OECD Publishing.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022: Non-state actors in education*. UNESCO Publishing.
- Wijaya, A., & Samsirin. (2023). Evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 77–90.
- World Bank. (2021). *The state of the global education crisis: A path to recovery*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1779-6>